

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aksi Terorisme saat ini bukanlah suatu hal yang baru atau asing bagi masyarakat internasional. Munculnya suatu kelompok teroris dunia seperti Islamic State (IS) dan Al-Qaeda di wilayah Irak dan Suriah telah menyebabkan munculnya bibit-bibit teroris baru seperti kelompok teroris Jaish-E-Mohammed. Pola aktivitas dan serangan dari kelompok teroris global yang terjadi secara acak dan tidak dapat diprediksi ini akhirnya memperkuat peran vital lembaga-lembaga regional dan internasional dalam melawan aksi teroris.

Jaish-E-Mohammed (JeM) atau Army of Muhammad adalah kelompok Islam ekstrimis bersenjata yang didirikan pada tahun 2000 dan berbasis di Pakistan. Kelompok ini dibentuk oleh Maulana Masood Azhar, yang sebelumnya berperang di bawah bendera Harkat-ul-Mujahidin yang terkait dengan al-Qaeda dan bertujuan untuk menyingkirkan dan menghapuskan pengaruh kekuasaan India di Kashmir yang dikuasai India dengan cara meneror dan melakukan serangan yang ditujukan terhadap target keamanan dan pemerintah. M. M. Azhar mendirikan JEM setelah dibebaskan dari tahanan India pada 1999 dengan imbalan lebih dari 150 sandera yang ditahan di pesawat Air India yang dibajak dan dialihkan ke Kandahar, Afghanistan (Hashim, 2019).

Kelompok JeM memiliki setidaknya 100 simpatisan bersenjata di wilayah Pakistan, Kashmir dan Doda di India selatan (Jaish-e-Mohammad | A brief profile, 2023). Kelompok ini mendapatkan dukungan utamanya dari masyarakat Pakistan dan Kashmir, dan juga veteran Afghanistan dan Arab yang sebelumnya pernah terlibat dalam perang Afghanistan melawan Uni Soviet. Kelompok ini dipersenjatai dengan senapan mesin ringan dan berat, senapan serbu, mortir, bahan peledak rakitan, dan granat berpeluncur roket yang digunakan dalam aksi terorismenya.

Aksi terorisme yang dilakukan oleh JEM berlangsung pertama kali di India pada tahun 2001, kemudian berlanjut di tahun 2016, dan di tahun 2019. Serangan pertama JEM terjadi pada 13 Desember 2001 yang dikenal dengan *The Parliament Attack*. Penyerangan tersebut merupakan hasil gabungan dari kelompok terorisme JEM dan Lashkar-e-Taiba dengan jumlah lima pelaku teroris. Lashkar-e-Taiba (LET) sendiri juga merupakan kelompok ekstremis Islam yang dibentuk di wilayah Pakistan pada akhir tahun 1980an dengan tujuan untuk menyebarkan pengaruh ajaran Islam di wilayah Jammu dan Kashmir agar nantinya kedua wilayah tersebut menjadi negara Islam (Sisson, 2024). Dalam insiden tersebut setidaknya memakan tujuh korban jiwa diantaranya enam pegawai keamanan dan seorang tukang kebun, sedangkan 18 orang lainnya mengalami luka-luka. Karena aksi mereka inilah maka pada 2001, Departemen Luar Negeri AS menetapkan JEM sebagai Organisasi Teroris Asing (Das, 2023).

Serangan kedua (*The Pathankot Attack*) berlangsung pada 2 Januari 2016 yang menargetkan pangkalan angkatan udara India di Punjab. Diketahui enam anggota teroris dengan persenjataan lengkap saling berperang dengan pasukan

angkatan udara India dan berlangsung hingga tiga hari. Sebanyak tujuh anggota angkatan udara India tewas dalam serangan tersebut (Pathankot Attack, 2024). Serangan ketiga atau yang sering disebut dengan serangan Uri menjadi puncaknya dari aksi terorisme JEM yang terjadi pada 18 September 2016. Peristiwa tersebut merupakan salah satu serangan terorisme yang dilakukan oleh empat orang teroris dari kelompok Jaish-e-Mohammed yang menyerang markas brigade Angkatan Darat India di dekat kota Uri di Wilayah Persatuan India Jammu dan Kashmir. Dalam serangan itu terdapat setidaknya 19 tentara India tewas sedangkan 19-30 orang lainnya terluka (India Today Web Desk, 2022).

Serangan keempat (*Pulwama Attack*) terjadi pada 14 Februari 2019. Sasaran dari aksi terorisme tersebut yaitu Kepolisian Cadangan Pusat India dan menewaskan 40 anggota kepolisian India (Times, 2024). Akhirnya dengan banyaknya serangan teroris yang terjadi di India membuat perdana menteri India saat itu Narendra Modi membuat suatu resolusi untuk menghapuskan dan melawan segala bentuk terorisme yang dapat mengancam keamanan dan kestabilan di India.

Sebelum Narendra Modi dilantik menjadi Perdana Menteri India pada tahun 2014, pemerintah India juga telah mengambil beberapa tindakan dan kebijakan dalam menangani kelompok terorisme JEM. Dalam masa pemerintahan sebelumnya, India hanya menonjolkan penyelesaian konflik melalui diplomasi seperti melalui forum internasional United Nations dan dialog damai serta adanya negosiasi dengan Pakistan (Dwivedi, 2008). Hasil dari didesaknya Pakistan oleh India berhasil membuat keputusan dari United Nations untuk menjadikan Masood

Azhar ke dalam daftar teroris global (European Foundation For South Asian Studies, 2023).

Terdapat penelitian sebelumnya misalnya oleh A. Rendi Bira Saskia (2023) yang telah meneliti “Strategi *Counter-Terrorism* Amerika Serikat Terhadap Ancaman Kelompok Teroris Al-Qaeda di Pakistan, 2015-2018”. Pada penelitiannya mengambil fokus subjek kepada ancaman kelompok teroris Al-Qaeda dan negara yang menjadi targetnya yaitu Amerika Serikat dengan rentang waktu pada tahun 2015 hingga 2018. Tindakan yang diambil oleh pemerintah AS dijelaskan sejalan dengan konsep *Counter-Terrorism*.

Penelitian kedua dilakukan oleh Kartika Mumpuni (2021) dalam “Strategi Keamanan Filipina dalam Menangani Kelompok Teroris Abu Sayyaf di Filipina Selatan Tahun 2002-2009”. Pada penelitiannya berfokus pada subjek kelompok teroris Abu Sayyaf dan negara yang menjadi targetnya yaitu Filipina yang terjadi Filipina bagian selatan dengan rentang waktu tahun 2002 hingga 2009. Setelah meninjau kedua penelitian tersebut, penelitian yang hendak diambil penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, ditinjau dari beberapa aspek. Pertama, titik poin pembahasan yang diambil adalah negara India dengan kelompok teroris yang menjadi ancaman yaitu Jaish E-Mohammed. Kedua, waktu jangkauan penelitian diambil pada tahun 2014-2019. Tindakan yang diambil oleh pemerintah India nantinya akan dijelaskan dengan teori *Counter-Terrorism* menurut pendapat Barry R. Posen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, fokus penelitian penulis menekankan pada perspektif keamanan di India dan hubungannya dengan Pakistan untuk menggambarkan munculnya serangan terorisme. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu “Bagaimana Strategi Pemerintah India pada Masa Pemerintahan Narendra Modi dalam Upaya Menangani Terorisme JEM pada Tahun 2014-2022?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dilaksanakan penelitian yaitu untuk memenuhi persyaratan kelulusan program sarjana S1 Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dituliskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini secara khusus adalah untuk menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah India dalam memberantas kelompok teroris Jaish-E-Mohammed di wilayah India, baik secara domestik maupun internasional. Sehingga dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman terkait bagaimana saja langkah yang diambil oleh India untuk memberantas kelompok teroris Jaish-E-Mohammed di wilayah India.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 *Counter Terrorism*

Istilah *Counter Terrorism* memiliki beberapa definisi yang berbeda oleh berbagai ahli terorisme. Sandler mendefinisikan *Counter Terrorism* sebagai tindakan pemerintah yang diambil untuk mencegah tindakan teroris dan untuk mengurangi atau membatasi konsekuensi dari tindakan teroris (Sandler, 2005). Mentan (2004) sependapat bahwa kontra-terorisme adalah intervensi negara (dalam hal ini pemerintah) untuk merespon aksi terorisme. Menurut Omelicheva (2011), kontra-terorisme mencakup semua tindakan pemerintah, dalam dan luar negeri, yang ditujukan untuk membendung teroris, melindungi warga sipil dari kekerasan teroris, serta memulihkan dan memperkuat ketertiban sosial di masyarakat (Omelicheva, 2011).

Terorisme sendiri secara umum merupakan suatu tindakan kekerasan yang sudah terencana untuk menciptakan iklim ketakutan umum dalam suatu masyarakat dan dengan demikian dapat mewujudkan tujuan politik tertentu (Jenkins, 2024). Menurut Juergensmeyer (2003), terorisme sering dikaitkan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak diakui oleh pemerintah dan mereka termotivasi oleh ideologi ekstrim kiri atau kanan untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh. Beberapa ahli melihat terorisme sebagai tindakan yang mengancam dengan tujuan untuk menghancurkan target yang dituju demi kepentingan politik. Coady (2004) menjelaskan terorisme sebagai penggunaan kekerasan yang terorganisir untuk menyerang non-kombatan atau mereka yang tidak bersalah, dalam arti khusus

menyerang pemimpin mereka untuk tujuan politik. Dalam menghadapi ancaman terorisme, bisa dilakukan dengan menjunjung tinggi hukum, merancang dan menerapkan kebijakan, membuat keputusan politik dan pilihan moral atas nama kemanusiaan. Dalam hal ini, pembuat keputusan harus membuat peraturan dan kebijakan yang lebih baik, pilihan politik dan moral yang lebih bijaksana dan efektif (Primoratz, 1990).

Ada beberapa istilah lain yang biasa digunakan ketika berhadapan dengan terorisme. Selain kontra-terorisme, ada juga istilah anti-terorisme. Kontra-terorisme mengacu pada upaya untuk mencegah atau menghalangi serangan teroris, serta upaya untuk mengurangi efek dari serangan teroris di masa depan. Kontra-terorisme dapat dilihat sebagai tindakan defensif (Omelicheva, 2011). Kontra-terorisme adalah tindakan melawan terorisme atau upaya untuk menghentikan terorisme. Kontra-terorisme menyoroti upaya pemerintah jika terjadi serangan teroris. Namun pada prinsipnya, perang melawan terorisme juga melibatkan upaya defensive dan offensive. Sesuai dengan pendapat Omelicheva, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara kontra-terorisme dan anti-terorisme, karena fitur utama anti-terorisme tertanam dalam kontra-terorisme (Omelicheva, 2011).

Tentang kerja sama luar negeri, Barry R. Posen menjelaskan bahwa dalam memerangi terorisme, suatu negara harus memiliki strategi yang berfokus pada sumber daya nasional: uang, waktu, modal politik dan kekuatan militer (Posen, 2001-2002). Sumber daya ini dapat digunakan untuk membangun berbagai strategi kontra-terorisme, atau sekutu untuk bekerja

bersama lintas negara guna memerangi kejahatan teroris transnasional. Negara yang sedang dalam ancaman teror dan berusaha menanggulangnya harus berusaha memperbesar kapabilitas diplomasi dan pertahanan mereka karena menurut Posen (2001-2002) kedua faktor inilah yang akan berperan lebih besar dalam upaya kontra teror. Strategi kontra teror sangat penting dimiliki oleh suatu negara karena dengan adanya suatu strategi yang tepat maka suatu negara akan mampu menciptakan skala prioritas atas penggunaan sumberdaya mereka mengingat sangat terbatasnya sumber daya yang dimiliki suatu negara dan sifat perang melawan teror yang bersifat berkelanjutan.

Dalam bukunya, Posen (2001-2002) mengungkapkan adanya strategi melalui dimensi militer dan diplomasi. Dalam perang melawan terorisme, dimensi diplomasi akan lebih besar dibandingkan dengan dimensi militer. Melalui diplomasi nantinya dapat menghadirkan adanya sekutu yang dimana sangat penting untuk keberhasilan perang melawan terorisme dan untuk membangun koalisi yang luas. Dalam dimensi militer, aktivitas defensif akan lebih besar dibandingkan dengan aktivitas ofensif. Tindakan pencegahan defensif yang intensif dapat meminimalisir kerentanan suatu negara terhadap serangan terorisme. Untuk itu, negara harus mempertahankan kemampuan militer konvensional yang kuat dengan melakukan pengalihan atau perluasan pada personel militer dan perlunya aset mobilitas tambahan seperti pesawat, helikopter, dan peralatan lain yang lebih canggih. Tindakan ofensif dan kemampuan ofensif militer juga menjadi komponen penting dari strategi

counter-terrorism. Tindakan ofensif terhadap teroris diperlukan untuk menghilangkan mereka sebagai suatu ancaman terhadap negara.

Posen (2001-2002) menekankan pentingnya pembentukan sekutu dan kerja sama antar negara untuk memberantas kejahatan transnasional terorisme, sehingga dibutuhkan tindakan atau upaya yang melintasi batas negara. Pembentukan aliansi dan kerja sama antar negara ini penting dalam menekan aksi teror karena negara asal (*Host Country*) lebih mengenal dan memahami kultur, budaya, serta kondisi medan di negara mereka. Posen (2001-2002) menyebutkan bahwa di sinilah peran vital diplomasi semakin terlihat, sebagai upaya untuk mengajak negara lain untuk bergabung dalam aliansi dan saling bekerja sama. Selain upaya mengandalkan diplomasi dengan negara asal, upaya ofensif juga perlu dilakukan dalam pemberantasan terorisme. Upaya ofensif bertujuan untuk melemahkan organisasi teroris dengan menyerang infrastruktur mereka melalui serangan militer konvensional maupun operasi gabungan dengan negara lain (dilakukan apabila infrastruktur kelompok terorisme berada di dalam wilayah yurisdiksi negara lain) untuk memutus akses kelompok teror terhadap pasokan sumber daya baik material maupun non-material.

Operasi ofensif merupakan salah satu komponen penting dalam strategi kontra-terorisme yang efektif. Tindakan ofensif diperlukan untuk mengeliminasi kemungkinan ancaman kelompok terorisme dan memaksa teroris untuk memikirkan ulang tindakannya sebelum melancarkan aksinya, karena selalu ada konsekuensi dari setiap aksi yang dilakukan (*Stick and Carrot*

Concept). Menurut Posen (2001-2002), aksi ofensif yang baik diperlukan tindakan ofensif yang menggabungkan unsur *Surveillance* (pengintaian), *Pursuit* (pengejaran), dan *Offensive Action* (aksi ofensif). Pengintaian dilakukan untuk mempersulit kelompok terorisme dalam merencanakan aksi dan mengorganisir anggota kelompoknya. Kemudian pengejaran dilakukan untuk membuat kelompok terorisme selalu bersembunyi dan menyita waktu istirahat mereka. Tindakan ofensif yang konstan dilakukan untuk membuat kelompok terorisme merasa kelelahan.

Posen (2001-2002) menambahkan bahwa peningkatan kemampuan pertahanan juga perlu dilakukan sebagai upaya memberantas terorisme. Peningkatan kemampuan pertahanan dapat dilakukan dengan upaya penambahan jumlah personel dan persenjataan, pengakuisisian teknologi yang lebih canggih, dan peningkatan kemampuan personel dalam bidang kontra-terorisme. Kemampuan personel dapat ditingkatkan dengan latihan bersama dan konferensi untuk bertukar pengalaman dengan negara lain. Upaya tersebut diharapkan dapat menekan tingkat destruktivitas (kerusakan) dari ancaman aksi terorisme. Selain itu, kapabilitas intelijen harus ditingkatkan karena intelijen yang baik dapat memberikan informasi terhadap rencana aksi terorisme berikutnya dan mencegah adanya ancaman terorisme. Intelijen yang efektif dilakukan apabila mereka mampu memfokuskan semua informasi yang berguna dalam satu media.

1.5 Sintesa Pemikiran

Gambar 1.1 Bagan Sintesa Pemikiran



Sumber: Penulis

Berdasarkan sintesa pemikiran diatas, aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok teroris menjadi sebuah ancaman terhadap suatu keamanan negara. Aksi terorisme yang dijalankan secara sistematis dan penuh perencanaan membuat aksi tersebut untuk sulit terdeteksi oleh suatu negara sehingga menimbulkan banyak kerusakan dan bahkan memakan banyak korban jiwa. Untuk itu dalam menghadapi ancaman terorisme tersebut, penulis menggunakan teori *Counter-Terrorism* menurut pendapat dari Barry R. Posen untuk menjelaskan bagaimana strategi atau

kebijakan yang diambil oleh sebuah negara dalam menghadapi ancaman kelompok terorisme. Dalam teori *Counter-Terrorism*, Posen (2001-2002) menjelaskan bahwa strategi kontra-terorisme berfokus pada sumber daya nasional yaitu waktu, uang, modal politik dan kekuatan militer. Oleh karena itu, Posen berpendapat beberapa hal tentang bagaimana *Counter-Terrorism* dapat dilakukan. Teori *Counter-Terrorism* dapat dilakukan dengan menjalin suatu hubungan kerja sama dan pembentukan aliansi, meningkatkan kapasitas pertahanan, dan melalui tindakan ofensif. Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan bagaimana India menerapkan konsep *Counter-Terrorism* karena adanya ancaman teror dari kelompok terorisme Jaish-E-Mohammed melalui upaya diplomasi dan tindakan ofensif.

1.6 Asumsi/Argumen Utama

Pemerintah India menanggapi isu terorisme dalam isu permasalahan yang penting untuk segera diselesaikan. Melalui pembentukan aliansi dan kerja sama dilakukan India dengan menjalin hubungan kerja sama dengan beberapa organisasi internasional dan Pakistan. Bahkan pemerintah India harus membuat strategi-strategi baru untuk menghadapi terorisme misalnya dengan melakukan diplomasi dengan Pakistan agar dapat bersikap kooperatif dan mendesak Pakistan untuk turut membantu dalam melacak dan menghapus kelompok terorisme JEM. Selain itu, India juga aktif terlibat dalam forum Internasional untuk meningkatkan isu terorisme yang sedang terjadi dan mendapatkan dukungan dari masyarakat Internasional. Forum Internasional yang dimaksud meliputi United Nations General

Assembly (UNGA), United Nations Security Council (UNSC), Financial Action Task Force (FATF), BRICS dan SCO Summit, dan beberapa forum bilateral dan regional. Untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya, India membeli jet tempur Rafale milik Perancis dan senapan Sig Sauer 716 G2 milik Amerika. Selain itu, India juga melakukan latihan operasi militer bersama pasukan Amerika. Untuk upaya ofensif dalam menghadapi terorisme seperti pada tahun 2016, India menginisiasi operasi bedah militer di Kashmir, wilayah milik Pakistan dengan melewati batas Line of Control (Loc) yang bertujuan sebagai pesan untuk JEM bahwa pemerintah India mampu untuk mengambil jalur ofensif. Lalu pada tahun 2019, pemerintah India melakukan serangan udara oleh *Indian Air Force* (IAF) dengan menjatuhkan bom tepat kepada markas tenda JEM di Balakot, Pakistan. Dalam hal ini pemerintah India berupaya untuk meningkatkan hubungannya dengan Pakistan dan bekerja sama dalam mewujudkan kehidupan yang terbebas dari rasa teror.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengambil variabel yang data-datanya sudah ada tanpa proses manipulasi dan dibuat untuk menggambarkan suatu variabel secara mandiri tanpa membandingkan maupun menghubungkan dengan variabel lainnya (Kosasih, 2024). Dengan penelitian deskriptif nantinya dapat menyesuaikan dengan

penjelasan mengenai strategi kontra-terorisme India melalui upaya diplomasi dan aksi ofensif.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam penelitian ini adalah tahun 2014 hingga 2022. Tahun 2014 dipilih berdasarkan diangkatnya Perdana Menteri baru India yaitu Narendra Modi. Narendra Modi yang memiliki visi dan misi yang ingin menghapuskan terorisme tentu mengambil tindakan dan kebijakannya yang sesuai dengan visinya tersebut. Jangkauan penelitian dipilih hingga 2022 karena berdasarkan keterbatasan data dan belum ada data mengenai tahun-tahun berikutnya.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi pustaka atau library research. Teknik ini menggunakan referensi sumber data yang didapatkan melalui data-data sekunder seperti buku-buku, jurnal, serta sumber-sumber lain melalui internet yang merupakan dokumen tertulis (Kosasih, 2024). Informasi-informasi lain juga didapatkan melalui temuan-temuan yang dihasilkan oleh pihak lain berupa buku yang ditulis oleh para ahli maupun jurnal penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif ini dipilih karena dapat digunakan

untuk menginterpretasikan data dengan memberi arti pada data yang diperoleh dan mengubah atau membuat data-data yang tersebut agar dapat dimengerti (Kosasih, 2024). Selain itu dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat mengetahui dengan jelas bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah India untuk menekan bahkan dapat menghapuskan aksi terorisme.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Bab I yang berisi Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penelitian berupa isu permasalahan yang diangkat atau gambaran fenomena awal. Selain itu, ada juga rumusan masalah, teori yang digunakan, argumen utama sebagai jawaban sementara, dan terdapat metode penelitian yang didalamnya terdapat jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data penelitian.

Bab II yang berisi Strategi dan kebijakan pemerintah India dalam menghadapi terorisme Jaish E-Mohammed melalui upaya aliansi dan kerja sama.

Bab III yang berisi Strategi dan kebijakan kebijakan pemerintah India dalam menghadapi terorisme Jaish E-Mohammed melalui peningkatan pertahanan dan upaya operasi ofensif.

Bab IV yang berisi Penutup yang memuat kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang telah penulis buat.